

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan Inflasi/Deflasi Provinsi Sumatera Selatan Per triwulan Tahun 2022

NO	Bulan (2022)	Inflasi/deflasi per bulan (mtm)%	Inflasi/Deflasi kumulatif (ytd)%	Inflasi/Deflasi Tahunan (yoy)%	Komoditi Penyumbang Inflasi/Deflasi	Penyebab
1	Januari	0,93	0,93	2,34	Sewa rumah, beras, daging ayam ras, ikan mujair, ikan nila dan bahan bakar rumah tangga	naiknya permintaan, belum ada panen raya (feb-april) masih memafaat stok yang ada (beras),
2	Februari	-0,01 (deflasi)	0,92	2,41	Komoditi yang dominan andil deflasi: daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng	Komoditi mengalami penurunan harga dibanding dengan rata-rata bulan sebelumnya, turunnya minyak goreng dikarenakan adanya subsidi dari pemerintah terhadap harga minyak goreng yang naik
3	Maret	0,69	3,44	4,44	angkutan udara, bawang merah, cabai merah, telur ayam ras dan daging ayam ras	komoditi mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan dibandingkan dengan bulan sebelumnya, akibat naiknya permintaan terhadap komoditi menjelang bulan ramadhan,

- Beberapa komoditi pangan pada triwulan I cenderung mengalami kenaikan pada beberapa komoditi yaitu cabai merah, daging ayam ras, dan minyak goreng (naik akibat imbas ketidakpastian global yang menyebabkan kenaikan pasokan energi). Kenaikan Harga Minyak

goreng pertriwulan I masih tertahan dengan adanya subsidi dari pemerintah pusat, dimana masyarakat masih dapat membeli minyak kemasan seharga Rp. 14.000,- dan pemerintah daerah melalui Operasi Pasar Murah (OPM), namun kemungkinan harga minyak goreng akan tetap mengalami kenaikan untuk bulan kedepannya.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

-Kondisi setelah Pandemi Covid 19 saat ini menyebabkan perlambatan aktifitas ekonomi akibat menurunnya daya beli masyarakat.

-Ketidakpastian global yang menyebabkan kenaikan pasokan energy (bahan bakar) mengakibatkan naiknya harga minyak goreng yang bahan bakunya merupakan salah satu bahan baku bahan bakar.

- Kenaikan harga beberapa bahan pangan lainnya akibat dari dampak adanya kenaikan harga bahan bakar dunia. Hal ini pada akhirnya juga berpengaruh pada tingkat inflasi Nasional dan di Sumatera Selatan pada triwulan I tahun 2022. Adanya kenaikan harga minyak goreng Kenaikan harga terjadi juga pada komoditi pangan di Sumatera Selatan antara lain daging ayam ras, cabai merah, bawang merah, dan telur ayam ras.

Harga minyak goreng biasanya dijual Rp. 13.000/liter dan terus mengalami kenaikan sejak penghujung tahun lalu hingga maret 2022 harga minyak goreng mencapai Rp.19.000/liter. Daging ayam ras harga pada awal tahun (januari) 2022 rata-rata Rp.38.000/kg pada maret Rp. 33.000/kg. dan telur ayam ras di akhir triwulan I Rp.27.000/kg untuk penyediaannya merupakan produk lokal dan kebutuhan cukup namun dikarenakan komoditi tersebut juga diminta oleh daerah luar sehingga mengurangi supply dalam daerah, untuk cabe dikarenakan cuaca untuk harga Rp.48.000 - Rp. 50.000/kg dan untuk komoditi bawang merah disediakan dari luar daerah harga diawal thn berkisar Rp.28.000/kg diakhir triwulan I Rp. 35.000/kg.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Perangkat daerah Provinsi dalam rangka melaksanakan pengendalian inflasi di daerah melalui strategi 4k yaitu :

1. Upaya melalui **Ketersediaan Pasokan**, melalui:

- Pelaksanaan Program unggulan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) berupa pemberian bibit pertanian dan perlengkapan budidaya perikanan di 17 kab/kota Sumatera Selatan, pada triwulan I proses persiapan, identifikasi dan koordinasi.
- Pelaksanaan Program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang bertujuan untuk mengubah **mindset masyarakat dari sebagai pembeli menjadi penjual** dalam rangka pemenuhan Sasaran program ini adalah rumah tangga miskin dan non miskin yang ada di 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan dibuat SK Tim GSMP Provinsi Sumatera Selatan dan Stakeholder yang dilibatkan antara lain Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pemerintah (Pemprov Sumsel dan Kab/kota, Instansi vertikal, kecamatan/Desa/kelurahan), Karang taruna, Bisnis dan Organisasi lainnya. Pelaksanaan kegiatan ini didukung pembiayaan melalui CSR,

APBD dan lainnya. Kegiatan yang dilakukan adalah kemandirian pangan dengan pemanfaatan lahan/perkarangan untuk menghasilkan: sayur, buah segar, ikan, telur, dan daging ayam. Kegiatan berupa bantuan selain dari Pemerintah daerah juga CSR dari BUMN seperti dari Bank Mandiri dan Bank Sumsel Babel. Pemberian Bantuan kepada masyarakat antara lain Bibit ikan dan sarana prasarannya drum wadah pembiakan, pakan), bibit tananam, ayam. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat luas agar dapat dibudidayakan sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

- Pengembangan sentra bawang merah di Musi Rawas Utara, melalui penyediaan bibit bawang merah serta pelatihan budidaya bawang merah.
- Pelaksanaan program Pekarangan Pangan lestari di wilayah Sumatera Selatan
- Implementasi Digital Farming pada klaster cabai dan bawang merah binaan BI Sumsel bekerja sama dengan Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan.
- Kegiatan Penyaluran Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi (KPSH) Komoditi pangan, khususnya beras oleh Perum Bulog.
- Pelaksanaan pelatihan UMKM pengolahan pakan lokal untuk 17 kab/kota serta edukasi terkait Penyakit Mulut dan kuku (PMK).

2. Pemantauan **keterjangkauan harga** melalui:

- Monitoring harga komoditas bahan pokok secara harian oleh dinas terkait,
- Menyediakan pangan murah (beras, minyak goreng, dan bawang merah) melalui Opeasi Pasar dan Pasar Murah,

- **Operasi Pasar Murah**, Kenaikan harga minyak goreng sangat mempengaruhi daya beli dari masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menindaklanjuti arahan Presiden untuk segera melakukan Operasi Pasar murah minyak goreng secara massif ke pasar-pasar eceran di seluruh Indonesia dengan harga yang terjangkau dan menindaklanjuti Surat Dirjen Perdagangan dalam Negeri Nomor 01/PDN/UND/1/2022 tanggal 3 Januari 2022 perihal pembahasan Pelaksanaan Operasi Pasar Minyak Goreng, pemerintah daerah mendukung upaya pengendalian harga dengan pelaksanaan Operasi Pasar Murah sembako, khususnya minyak goreng yang dikoordinir oleh Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Operasi pasar murah selain berkoordinasi dengan Pemerintah kab/kota bekerja sama dengan perusahaan Produsen minyak goreng yaitu PT. Indo Karya Internusa dan Perum Bulog Wilayah Sumsel Babel untuk komoditi beras dan gula pasir. Pelaksanaan operasi pasar murah dilaksanakan di 14 titik pasar di dalam Kota Palembang dan 4 titik di pasar Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Muara Enim dan Ogan Komering Ilir. Minyak Goreng yang disiapkan sebanyak 52 ton dan beras medium sebanyak 60 ton. Minyak goreng dijual dari harga Rp.14.000/kg, gula pasir Rp.12.500/kg dan beras medium Rp. 9000/kg. Waktu pelaksanaan mulai dari tanggal 12 Januari s.d. 21 Januari 2022. Dengan adanya operasi pasar murah ini Pemerintah telah menetapkan harga tunggal minyak goreng berbagai merk Rp. 14.000,-/liter dan berlaku pada tanggal 19 Januari 2022 di Ritel Modern di seluruh Indonesia, sedangkan bagi pasar tradisional diberikan waktu 1 (satu) minggu untuk penyesuaian.

- Pembelian Beras lokal setiap bulannya oleh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dikoordinir oleh OPD masing-masing bekerja sama dengan perum Bulog, sebagai himbauan dari Gubernur Sumatera Selatan untuk

menggunakan beras petani lokal dalam rangka menjaga stabilitas harga dan menjaga tingkat inflasi pada komoditi beras. Hal ini telah dilaksanakan sejak tahun 2019 s.d. sekarang.

- Gelar pangan murah oleh Toko Tani Center, dan Pasar Tani secara mingguan oleh Dinas Pertanian Sumsel.

3. **Kelancaran distribusi** dengan melakukan sidak pasar dan monitoring pasar di tingkat kab/kota; memprioritaskan angkutan komoditas bahan pangan, serta pelaksanaan kunjungan TPID Provinsi Sumsel ke Food Station Jakarta d.r inisiasi KAD untuk komoditi beras.

4. **Komunikasi yang efektif** juga terus dilakukan melalui pelaksanaan rapat koordinasi di tingkat Provinsi Sumsel maupun Kab/Kota:

- Rapat teknis TPID Provinsi Sumatera Selatan tanggal 11 Januari 2022 dengan ketua Harian TPID Prov. Sumsel dan anggota TPID dalam rangka Penyiapan penyusunan peta jalan pengendalian inflasi daerah Prov. Sumsel, 26-27 Januari 2022 hal ini dalam rangka menindaklanjuti Surat dirjen bangsa kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 500/5713/bangda tanggal 13 Desember 2021 hal peta jalan pengendalian inflasi daerah periode tahun 2022 - 2024. Bertempat di Ruang Rapat Besar Bank Indonesia Provinsi Sumatera

Ketua Harian TPID Prov. Sumsel telah bersurat kepada Ketua harian TPID 17 kab/kota di Sumatera Selatan nomor: 0500/4117/IV/2021 tanggal 27 Desember 2021 perihal peta jalan Pengendalian inflasi daerah periode tahun 2022-2024.

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Tentang Peta Jalan (roadmap) dan Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022-2024 diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2022 Nomor: 132/KPTS/IV/2022.

- Rapat koordinasi TPID Provinsi Sumatera Selatan tanggal 8 Maret 2022 bertempat di Ruang Rapat Bina Praja dipimpin oleh Ketua Harian TPID Provinsi Sumatera Selatan H. SA. Supriono, agenda rapat adalah

pembahasan evaluasi laporan kinerja dan program unggulan TPID Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021, menindaklanjuti surat Dirjen Bina Bangsa Kementerian Dalam Negeri RI selaku Ketua Pokja TPIP Nomor 500/1086/Bangda tanggal 15 Februari 2022 perihal evaluasi kinerja dan program unggulan TPID Provinsi Sumatera Selatan tahun 2021.

- Rapat koordinasi tanggal 25 Maret 2022 bertempat di ruang rapat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Rapat koordinasi Pengendalian Harga Pangan di Daerah menjelang Ramadhan dan Lebaran Tahun 2022.

▪

- Kegiatan HLM Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 30 Maret 2022 bertempat di Ballroom Hotel The Zuri Palembang, dipimpin oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Bpk. Mawardi Yahya). Diikuti oleh anggota TPID Provinsi Sumatera Selatan dan TPID 17 kabupaten/kota. Pelaksanaan dilakukan secara hybrid, langsung dan tidak Agenda Acara adalah membahas mengenai strategi pengendalian inflasi pada periode hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idulfitri 1443H/2022.

- Kegiatan Capacity Building “Strategi Kebijakan Pengendalian Inflasi dan peningkatan Kinerja TPID tanggal 30 Maret 2022, Upaya mendukung Implementasi Kerjasama Antar Daerah dan Mendorong Implementasi digital Farming”. Bertempat di Hotel Zuri pelaksanaan di mulai pukul 14.00 Wib s.d. 17.00 Wib. Bertempat di hotel The Zuri Palembang. Peserta Anggota TPID Provinsi/ Kabupaten/kota.
-
- Pelaksanaan koordinasi langsung/rapat di tingkat Pusat, Provinsi Sumsel maupun Pemerintah kabupaten/Kota ; serta koordinasi secara rutin whatsapp group TPID provinsi, kota dan kabupaten.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- a. Pelaksanaan Program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan dalam rangka menjaga ketersediaan Pangan yang berkelanjutan menjadi salah satu yang diupayakan agar mengubah mindset masyarakat dari pembeli menjadi penjual, sehingga harapan stock/ketersediaan pangan ada tersedia di sekitar masyarakat itu sendiri secara berkelanjutan.
- b. Pasar Murah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pangan dan saat ini khususnya menjaga stabilitas harga minyak goreng yang harganya masih terus naik, Namun kegiatan operasi pasar murah dapat membantu masyarakat dalam jangka pendek.
- c. Pelaksanaan operasi pasar dilaksanakan masih terbatas oleh anggaran dan sumber daya, sehingga belum dapat dirasakan secara merata/menyeluruh oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Harga minyak goreng yang mengikuti harga pasar internasional sangat mempengaruhi dan memberi gejala kepada konsumen di dalam negeri karena minyak goreng walaupun bukan merupakan bahan pangan pokok namun merupakan bahan yang digunakan sehari-hari dalam mengolah makanan, maka minyak goreng termasuk bahan penting yang perlu dipenuhi.

Langkah antisipasi perlu segera dirumuskan dengan tujuan untuk mencapai tingkat inflasi yang stabil. Saran dan masukan memperhatikan Kondisi tingkat inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan I tahun 2022 Beberapa hal yang perlu ditempuh antara lain :

1. Langkah-langkah koordinasi kebijakan pengendalian inflasi perlu semakin diperkuat baik dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah dengan dukungan peran dari Kepala Daerah dan pemegang keputusan dan Mengintensifkan koordinasi dengan semua pihak terkait guna menjamin ketersediaan pasokan, produksi dan kelancaran distribusi kebutuhan bahan pangan pokok dan bahan pendukung
2. Mendorong percepatan Pelaksanaan Pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk mendukung kelancaran produksi dan distribusi bahan pangan.
3. Melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung kebijakan pemerintah seperti Harga BBM, LPG dll terkait penyesuaian harga komoditas.
4. perlu upaya yang berkelanjutan untuk operasi pasar murah selama kondisi pasokan bahan bakar global belum stabil.
5. Perlu peran aktif BUMD Pangan dalam hal penyediaan stok bahan pangan pokok agar

harga bahan pangan pokok dapat terkendali, BUMD dapat berfungsi sebagai penyerap produksi petani, sekaligus distribusi dan pemasaran dan berpihak pada kepentingan rakyat karena BUMD adalah milik pemerintah daerah.

6. Peningkatan koordinasi antar TPID Provinsi dan kabupaten/kota dapat meningkatkan dan menjadi wadah kerjasama dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan pangan pokok baik dari sisi produksi/teknologi produksiterhadap peningkatan kapasitas dan intensitas produksi, dan dari sisi pemasaran/kelancaran distribusi sampai ke pada masyarakat (konsumen).